

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN
TANAMAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg)

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana***



Oleh:

FADILLAH FIRMANSYAH NUR

1610012111112

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

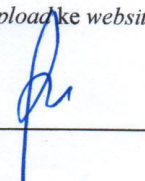
No. Reg : 34/Pid/02/III-2021

Nama : Fadillah Firmansyah Nur
NPM : 1610012111112
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika
Golongan I Bukan Tanaman Studi Putusan
Nomor (555/Pid.Sus/2020/PN Pdg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Yetisma Saini S.H., M.H.)

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
(Putusan Nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg)**

Fadillah Firmansyah Nur¹, Uning Pratimaratri¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: fadillahfirmansyahnurgmail.com

ABSTRACT

The criminal offense without the right to possess narcotics group I instead of plants is regulated in Article 112 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No.35 of 2009. The defendant with the initials A Bin Z violates Article 112 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 and sentenced to imprisonment for four (4) years and a fine of Rp. 800,000,000, - (eight hundred million rupiah). Formulation of the problem 1. What is the criminal responsibility for the perpetrator of a criminal offense without the right to have narcotics class I instead of plants in decision Number 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg? 2. What was the basis for the judge's consideration in imposing a criminal offense against the perpetrator of a criminal act without the right of possession of narcotics class I instead of plants in the decision Number 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg?. The type of research used is normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search of the regulations and literature related to the problem under study. Conclusion of the research 1. To find out the criminal responsibility towards perpetrators of criminal acts without the right to have narcotics class I instead of plants in the decision Number 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg? 2. To find out the judge's consideration of the perpetrator of a criminal offense without the right to have narcotics class I instead of plants in the decision number 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg? To find out the criminal responsibility towards perpetrators of criminal acts without the right to have narcotics class I instead of plants in decision Number 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg? 2. To find out the judge's consideration of the perpetrator of a criminal offense without the right to have narcotics class I instead of plants in the decision number 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg? To find out the criminal responsibility towards perpetrators of criminal acts without the right to have narcotics class I instead of plants in decision Number 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg? 2. To find out the judge's consideration of the perpetrator of a criminal offense without the right to have narcotics class I instead of plants in the decision number 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg?.

Keywords: Accountability, Narcotics, Criminal, Without Rights

PENDAHULUAN

Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika diperlukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mengingat efek samping narkotika yang menimbulkan ketergantungan, penggunaan narkotika diatur secara ketat.

Penyalahgunaan terhadap narkoba diancam pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika). Salah satu penyalahgunaan narkoba yang diancam pidana adalah tanpa hak memiliki narkoba golongan I.

Kasus tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman terdakwa A Bin Z. Pada perkara putusan Nomor 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg bahwa terdakwa yang berinisial A Bin Z melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut karena terdakwa melakukan kegiatan yang mana dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang digunakan dalam penelitian hukum yang didasarkan pada sumber formal. Dikatakan bahan

hukum ini mempunyai kekuatan yang mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, esiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dimana mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan bantuan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan literatur dan kepustakaan yang ada.

4. Analisis Data

Setelah data telah diperoleh, maka kemudian akan dianalisis dengan cara menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang artinya adalah menganalisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara terperinci yang kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

² Ibid, hlm. 13.

Pada Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut oleh sistem hukum pidana di Indonesia. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Adanya suatu tindak pidana yang terdakwa lakukan
2. Kesalahan Terdakwa
3. Mampu Bertanggungjawab
4. Tidak adanya alasan pemaaf

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Pada Perkara Nomor 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak dengan sembarangan, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan hakim ada 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-Hal tersebut adalah:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
 - c. Fakta-fakta
 - d. Alat Bukti
 - e. Barang Bukti
- 2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis**

Berdasarkan perkara ini, ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan yang mana hal tersebut telah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan suatu putusan adalah:

- a. Hal-hal yang memberatkan
- b. Hal-hal yang meringankan

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian rumusan masalah yang ada di atas, yang mana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan atas hasil yang telah dilakukan adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2020/PN Pdg sudah sesuai dengan norma yang berlaku, dan semua unsur tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Semua telah terpenuhi sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Mengingat tindak pidana kesusilaan melalui Informasi Elektronik atau melalui Media Sosial sekalipun telah semakin berkembang dengan modus yang lebih baru dan baru lagi. Oleh karena itu bagi aparat penegak hukum, agar melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku yang meresahkan masyarakat ataupun pribadi, sehingga dapat memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.